



**AKADEMI KOMUNITAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI (352595)**

LAPORAN KEUANGAN GLP SEMESTER II 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan SDM KP yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wakatobi, 31 Desember 2025
Direktur

Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19780306200901 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	38
VI. Lampiran	
A. Cetakan Monsakti per 31 Desember 2025 (LRA, Neraca, LO, LPE dan Neraca Percobaan Akrua)	
B. Surat Menkeu Terkait Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	
C. Surat BPPSDM KP Terkait Penyampaian Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDM KP TA. 2025	
D. SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Terkait Penghapusan BMN (KDP)	
E. Bukti Setor Pengembalian Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu(TAYL) TA. 2025	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
WAKATOBI**

JALAN SOEKARNO-HATTA, DESA MATAHORA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

LAMAN www.kkp.go.id SUREL akkp.wakatobi@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wakatobi, 31 Desember 2025

Direktur,

DR. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19780306200901 1 004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur LRA Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp 23,161,771 atau mencapai 134.84 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester II Tahun 2025 adalah senilai Rp. 4,594,422,108,00 (Netto) atau mencapai 98,11 persen dari alokasi anggaran senilai Rp. 4,683,167,000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp 27,581,234,717,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp 2,599,000,00; Aset Tetap (neto) senilai Rp 27,578,635,717,00; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp 0,00 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing senilai Rp 0,00 dan Rp 27,581,234,717,00 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 27,581,234,717,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 9,154,771,00 sedangkan jumlah beban adalah senilai Rp 5,353,023,099,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (5,343,868,328).

Kegiatan Non Operasional Lainnya surplus senilai Rp 14,007,000,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai (5,329,861,328)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 ekuitas awal Rp. 28,339,835,708,00 menjadi Rp. 27,581,234,717,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025		% thd Angg	30 Juni 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	17.177.000	23.161.771	134,84	20.718.402
JUMLAH PENDAPATAN		17.177.000	23.161.771	134,84	20.718.402
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	2.698.933.000	2.667.783.970	98,85	2.166.969.912
Belanja Barang	B.2.2	1.984.234.000	1.926.638.138	97,10	3.229.776.645
Jumlah Belanja Operasi		4.683.167.000	4.594.422.108	98,11	5.396.746.557
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3.	-	-	#DIV/0!	11.599.000
Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan GB					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	#DIV/0!	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	B.2.3.1	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Jaringan					
Belanja Modal Lainnya					
Jumlah Belanja Operasional		-	-	#DIV/0!	11.599.000
JUMLAH BELANJA		4.683.167.000	4.594.422.108	98,11	5.408.345.557

II. NERACA

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI NERACA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dibendahara Pengeluaran	C.1.	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.	-	-
Persediaan	C.3	2.599.000	5.072.000
Kas Lainnya dan setara Kas	C.4	-	-
Jumlah Aset Lancar		2.599.000	5.072.000
ASET TETAP			
Tanah	C.4.	9.141.918.500	9.141.918.500
Peralatan dan Mesin	C.5.	3.774.472.477	3.774.472.477
Gedung dan Bangunan	C.6.	21.563.309.980	21.563.309.980
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.7.	237.704.730	237.704.730
Aset Tetap Lainnya	C.8.	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.9.	42.600.000	42.600.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10.	(7.181.369.970)	(6.425.241.979)
Jumlah Aset Tetap		27.578.635.717	28.334.763.708
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11.	-	-
Aset Lain-lain	C.12.	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset la	C.13.	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		27.581.234.717	28.339.835.708
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Utang kepada Pihak Pertama		-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.15.	27.581.234.717	28.339.835.708
Jumlah Ekuitas		27.581.234.717	28.339.835.708
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		27.581.234.717	28.339.835.708

III. LAPORAN OPERASIONAL

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.	9.154.771	11.850.227
JUMLAH PENDAPATAN		9.154.771	11.850.227
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.667.783.970	2.166.969.912
Beban Persediaan	D.3.	30.842.130	58.764.880
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.698.953.219	2.189.300.652
Beban Pemeliharaan	D.5.	176.791.289	577.082.479
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	22.524.500	401.651.384
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	756.127.991	801.789.021
JUMLAH BEBAN		5.353.023.099	6.195.558.328
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.343.868.328)	(6.183.708.101)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.8			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.007.000	8.868.175
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)			
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)			
		(5.329.861.328)	(6.174.839.926)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		(5.329.861.328)	(6.174.839.926)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	28.339.835.708	29.127.048.479
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.329.861.328)	(6.174.839.926)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
- Koreksi Nilai Aset Tetap non revaluasi		-	-
- Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset		-	-
- Koreksi Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	4.571.260.337	5.387.627.155
- Ditagihkan ke entitas lain		4.571.260.337	5.387.627.155
- Diterima dari entitas lain			
- Transfer masuk			
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(758.600.991)	(787.212.771)
EKUITAS AKHIR	E.4.	27.581.234.717	28.339.835.708

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dan Nomor : 36/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Entitas berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 153 bahwa Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset dibidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mempunyai tugas Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kelautan dan Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi :

- a. Dalam Melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pembinaan karakter;
- h. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktek kerja taruna serta urusan alumni
- j. pelaksanaan pengawasan internal;
- k. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
- l. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berkomitmen dengan visi **“Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam Pengelolaan Ekosistem Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Kawasan Indonesia Timur.”**

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

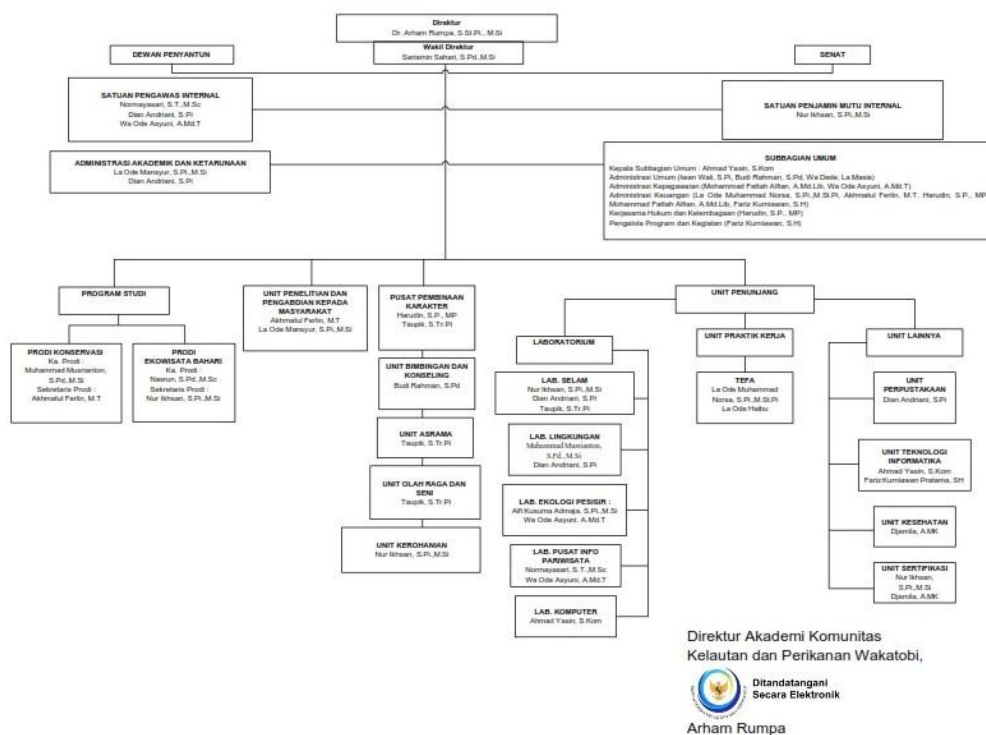
- Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis dan kompetitif bertaraf nasional dan internasional;
- Meningkatkan kualitas penelitian terapan kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan pengabdian terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Melengkapi dan menyempurnakan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar nasional dan internasional;
- Melaksanakan pengadministrasian dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001- 2015.

Data Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi didukung oleh 28 ASN dan 9 PJLP dengan rincian sbb :

- ✓ Tenaga Fungsional Dosen PNS sebanyak 9 Pegawai
- ✓ Tenaga Fungsional Dosen PPPK sebanyak 3 Pegawai
- ✓ Tenaga Struktural PNS 2 Pegawai
- ✓ Tenaga Fungsional APBN 1 Pegawai
- ✓ Struktural PPPK 7 Pegawai
- ✓ Perawat PPPK 1 Pegawai
- ✓ PPPK Paruh Waktu 2 Pegawai
- ✓ Pranata Laboratorium Pendidikan PPPK 2 Pegawai
- ✓ PJLP 9 Pegawai

Struktur Organisasi



Aplikasi SAKTI dan Kebijakan e-rekon di MONSAKTI

tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya Penggunaan Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang baru untuk tahun 2025 Permasalahan-permasalahan tersebut biasa terjadi pada semua Satuan Kerja, pada unit-unit akuntansi level Wilayah/UAPPA-W, Eselon I maupun Kementerian/Lembaga. Berbicara

mengenai akurasi data, ujung tombaknya adalah Satuan Kerja, tetapi bicara tentang koordinasi dan monitoring akurasi data, ujung tombaknya adalah UAPPA-W.

Selalu ada solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. apabila terdapat permasalahan terkait peningkatan kualitas LKKL harus sesegera mungkin untuk diselesaikan dengan cara mengoptimalkan telaah laporan keuangan. saat ini proses telaah sudah didukung dengan aplikasi MONSAKTI yang sangat mumpuni. penyusunan LKKL 2024 untuk menjadi perhatian bersama yaitu : 1). Penggunaan Satker konsolidasi, 2).Minimum kapitalisasi Aset Tetap 2025, 3).Integrasi data BMN kedalam e-Rekon&LK G2, 4).Kepdirjen baru terkait Bagan Akun Standar (BAS), 5).Rencana Eliminasi Hibah Langsung Belum Disahkan, 6).Monitoring Transfer Keluar-Transfer Masuk. Dari hasil kegiatan ini akan memberikan informasi yang lebih akurat terkait nilai Aset Negara.

Nilai minimum kapitalisasi berpedoman pada PMK 181 tahun 2016. Meskipun PMK ini sudah diterbitkan 2 tahun yang lalu, namun secara efektif berlaku pada tahun 2018. Dengan demikian perolehan aset tetap pada tahun 2018 sudah berpedoman pada peraturan ini. Sebagai informasi perubahan besaran nilai minimum kapitalisasi sbb : Peralatan dan mesin Rp. 300.000 ≤ menjadi Rp. 1.000.000 ≤, Gedung dan Bangunan dari Rp. 10.000.000 ≤ menjadi Rp. 25.000.000 ≤.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Akademi Komunitas KP Wakatobi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SAKTI Modul GLP yaitu serangkaian prosedur otomatis maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Sistem Akutansi terintegrasi ke semua aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Persediaan dan Aset. SAKTI GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan

Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI ASET adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis**Akuntansi****A.3. Basis Akuntansi**

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar**Pengukuran****A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi****A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP** yang merupakan entitas pelaporan dari **Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi** adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA****(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO****(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Akademi Komunitas Kelautan dan

Perikanan Wakatobi adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
- Pendapatan Biaya Pendidikan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Nilai aset tetap penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan dikarenakan transfer masuk dari Satker lain. Terutama dari Pusdik KP, SUPM Bone. Namun apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya dan dilakukan proses penghapusan aset.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

c) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2020 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang dikelola oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi pada tahun 2025 dengan Rincian sebagai berikut :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan	17.177.000,00	17.177.000,00
Jumlah Pendapatan	17.177.000,00	17.177.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.240.209.000,00	2.240.209.000,00
Belanja Barang	3.793.500.000,00	1.984.234.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.033.709.000,00	4.224.443.000,00

Anggaran tahun 2025, terdapat 9 kali Revisi yaitu :

1. Revisi DJA Blokir AA pada tanggal 21 Februari 2025.
2. Revisi DJA Blokir AA pada tanggal 09 April 2025
3. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) triwulan I pada tanggal 22 April 2025
4. Revisi POK Pergeseran antar akun dalam satu RO untuk Pemenuhan Operasional pada tanggal 28 April 2025
5. Revisi POK Pergeseran antar akun dalam satu RO untuk Pemenuhan Operasional tanggal 05 Juli 2025
6. Revisi DJA Pengurangan Pagu Belanja Barang tanggal 02 September 2025
7. Revisi POK Penyesuaian Rencana Penarikan Dana(RPD) tanggal Oktober 2025
8. Revisi DJA Optimalisasi Kebutuhan Belanja Gaji untuk PPPK Baru 20 November 2025
9. Revisi KPA Optimalisasi Kebutuhan Operasional tanggal 11 Desember 2025

Realisasi Pendapatan
Rp 23,161,771,00

B.1. Pendapatan

Kebijakan pengelolaan Pendapatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2025 adalah senilai Rp 23,161,771,00 atau mencapai 134,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp 17,177,000,00 Pendapatan Akademi Komunitas KP Wakatobi, terdiri dari Pendapatan Fungsional dan Umum. Pendapatan umum adalah dari Sisa Pemberian Bantuan Anak Pelaku Utama Perikanan berupa seragam sesuai dengan SBM.

Rincian realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025

Akun	Uraian Pendapatan	Realisasi s.d.31 Desember 2025
PNBP FUNGSIONAL		9.154.771
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.144.771
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	10.000
PNBP UMUM		14.007.000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	14.007.000
PNBP FUNGSIONAL + UMUM		23.161.771

PNBP tersebut berasal dari :

Tanggal	Akun	Uraian Pendapatan	NTPN	Hasil Kegiatan	Realisasi s.d.31 Desember 2025
	PNBP FUNGSIONAL				23.161.771
23 April 2025	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3ABAC3CIFTEM1PT8	Pengisian 16 tabung selam.Wonderfull Wakatobi	800.000
23 April 2025			8C04055DFIJDLOKI	Peminjamanmobil pick up1 hari an. Lutfipada tanggal15 April 2025	140.000
23 April 2025			619FE55DFIJKMUT	Pengisian 16 tabung selaman. Olo Scuba pada 18 April 2025	800.000
23 April 2025			8C04055DFIJDLOKI	Peminjamanmobil bus 2hari an. Lutfidari 14-15April 2025	700.000
26 Mei 2025			63E8F7QLV2DJQ0QH	Peminjamankendaraanbus 4 roda an.TomyAlmijunKibu selama 3hari daritanggal 20 -22 Mei 2025	1.050.000
30 Juni 2025			852A11JNG8FUUSAQ	Peminjaman kendaraan roda 4 berupa bus An.Sukirman pada 25 Juni 2025 untuk pengantaran jemaah haji Kabupaten Wakatobi	350.000
30 Juni 2025			0F8150NA0DTIHOCA	Peminjaman kendaraan roda 4 berupa bus An. Samo untuk kegiatan tamasya anak MTSN 1.Wangi-Wangi	350.000
07 Juli 2025			381783CIFTN13D1G	Sewa Bus SDN 1 Mandati 2	350.000
08 Juli 2025			C039D55DFIRS7UK8	Sewa bus selama 5 hari tgl 27 Juni s/d01 Juli 2025 an. WWF Indonesia	1.750.000
31 Juli 2025			98F0B1JNG8J2MPJ1	Peminjaman alat selam 2set an. Prof.Sri Pujiati pada hari Sabtu, 26 Juli 2025	900.000
31 Juli 2025			98F0B1JNG8J2MPJ1	Pengisian tabung selam 2 unit an.Prof. Sri Pujiati pada hari Sabtu, 26Juli 2025	100.000
30 September 2025			6635D0NA0E3HT8TP	Pengisian tabung selam oleh Sarfil Pesona Wakatobi pada tanggal 26 Agustus 2025 sebanyak 10 tabung	500.000
30 September 2025			9440F3CIFTTKQH7P	Pengisian tabung selam an. Guntur manager Olo Scuba Dive pada tanggal 24 September 2025 sebanyak 10 tabung	500.000
13 Oktober 2025			0F00A2G503DSVHDO	Peminjaman kendaraan roda empat berupa bus 1 hari pada tanggal 8 Oktober 2025 an, BPJS Kesehatan Wakatobi	350.000
12 Desember 2025			E5DDD3CIFU67L5HD	Peminjaman roda empat berupa bus selama 1 hari oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi pada tanggal 9 Desember 2025	350.000
01 Oktober 2025				Potongan SPM	154.771
26/05/2024	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	B43B961QV450MCD2	PENJUALAN BIBIT RUMPUT LAUT DI PAK ANWAR PEMBUDIDAYA	10.000
10/06/2024	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	E317D2G5031OGICN	Pengembalian kelebihan bantuan anak pelaku utama tahun anggaran 2024	6.063.000
27/08/2025			BD3583CIFTQN5KFG	Pengembalian atas PNBP hasil sampling kegiatan kewirausahaan tahun 2024 atas nama Dewi Utami	1.800.000
27/08/2025			A88EA0NA0E3HVKMM	Pengembalian Honor Pengelola Keuangan Tahun 2024 atas nama PPK	6.144.000

Realisasi Belanja
Negara
Rp4,594,422,108

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II Tahun 2025 adalah senilai Rp 4,594,422,108 atau 98,11 persen dari anggaran belanja senilai Rp 4,683,167,000 Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2025

Uraian	2025		
	Pagu Setelah Revisi	Realisasi 31 Desember 2025	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.698.933.000,00	2.667.783.970,00	98,85
Belanja Barang	1.984.234.000,00	1.926.638.138,00	97,10
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	4.683.167.000,00	4.594.422.108,00	98,11
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja Bersih	4.683.167.000,00	4.594.422.108,00	98,11

Realisasi Belanja TA 2025 **Turun** sampai 15,5 % **persen** dari tahun 2024 dikarenakan adanya Efisiensi atau pengurangan pagu Belanja barang terutama perjalanan dinas, penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun 2025 sebagai pembandingan di tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.667.783.970,00	2.166.969.912,00	23,11
Belanja Barang	1.926.638.138,00	3.229.776.645,00	(40,35)
Belanja Modal	-	11.599.000,00	(100,00)
Jumlah Bersih	4.594.422.108,00	5.408.345.557,00	(15,05)

Belanja Pegawai Rp,
2,667,783,970,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2,667,783,970,00 dan Rp. 2,166,969,912,00 untuk belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 13 pegawai PNS dan 13 PPPK. mengalami kenaikan sebesar 23,08% dikarenakan per Agustus 2025 ada penambahan 3 pegawai sudah sertifikasi dosen. An. Sariamin Sahari, Normayasari dan Alfi Kusuma Admaja, masuknya 1 pegawai baru

An. Dr. Arham Rumpa dibayar per september 2025, penambahan 9 PPPK baru yang terbayarkan per 1 Oktober 2025 dan adanya kenaikan gaji sebesar 8% per januari 2025

*Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember TA 2025 dan 2024*

URAIAN	30-Des-25	30-Des-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok	664.431.800	560.362.800	18,57
Belanja pembulatan gaji PNS	7.368	5.392	36,65
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.415.980	39.906.850	26,33
Belanja Tunj. Anak PNS	18.543.520	13.637.700	35,97
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	102.250.000	98.350.000	3,97
Belanja Tunj. PPh PNS	7.051.961	6.172.201	14,25
Belanja Tunj. Beras PNS	38.382.600	32.009.640	19,91
Belanja Uang makan PNS	91.812.000	74.796.000	22,75
Belanja Tunj. Umum PNS	4.560.000	3.415.000	33,53
Belanja Tunj. Profesi Dosen	195.429.600	50.567.700	286,47
Belanja Pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan)	772.493.496	802.675.424	(3,76)
Belanja Gaji Pokok PPPK	258.941.800	172.650.800	49,98
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.423	3.048	45,11
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.709.230	4.674.740	150,48
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.977.042	1.746.220	127,75
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.625.000	20.940.000	12,82
Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.397.700	6.807.480	96,81
Belanja Uang Makan PPPK	55.453.000	29.958.000	85,10
Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.840.000	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	343.897.450	241.030.917	42,68
Total	2.667.783.970	2.167.269.912	23,09

Belanja Barang

Rp1.930.538.138,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan 2024 senilai Rp 1.930.538.138,00 dan Rp. 3.229.776.645,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 40,23% dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Pengurangan Pagu dan efisiensi atau blokir AA sehingga mengakibatkan kurangnya belanja barang atau realisasi belanja barang.

**Realisasi Belanja Barang
31 Desember TA 2025 dan 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	491.336.013,00	650.684.587,00	(24,49)
Belanja Barang Non Operasional	607.567.996,00	484.256.768,00	25,46
Belanja Barang Persediaan	28.369.130,00	61.742.130,00	(54,05)
Belanja Jasa	603.949.210,00	1.054.359.297,00	(42,72)
Belanja Pemeliharaan	176.791.289,00	577.082.479,00	(69,36)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.524.500,00	401.651.384,00	(94,39)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	1.930.538.138,00	3.229.776.645,00	(40,23)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.930.538.138,00	3.229.776.645,00	(40,23)

Belanja Modal

Rp 0,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp 11.559.000,00 Realisasi belanja modal semester II tahun 2024

Belanja Modal**Penambahan Nilai****Gedung dan****Bangunan Rp,0,00****B.2.3.1. Belanja Modal Penambahan Nilai gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Penambahan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari 2025 sampai 2024 tidak ada.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka dari KPPN.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Kwintansi UP	-	-
Saldo Rekening Giro (BNI)	-	-
Jumlah	-	-

Nilai Kas di bendahara pengeluaran di rekening senilai Rp. 0,00 dan Rp.0,00 di tahun 2025 dan 2024

Kas Lainnya dan setara
kas Rp.0,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

Persediaan Rp2,599,000,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp 2,599,000,00 dan Rp 5,072,000,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24
Barang Konsumsi	2.599.000,00	5.072.000,00
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Jumlah	2.599.000,00	5.072.000,00

Nilai persediaan sebagaimana Berita Acara Stock Opname fisik persediaan digudang persediaan Nomor. 1589/AKKP.WKTB/PL.510/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 masing-masing adalah senilai Rp 2.599.000,00 terlampir.

No	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Satuan	Saldo Sistem	Hasil Opsik	KONDISI
						Baik/Usak/Rusak
1	1010302001000074	Kertas HVS 80 gram F4	Rim	20	1.356.000	Baik
2	1010302001000075	Kertas HVS 80 gram A4	Rim	20	1.243.000	Baik
Total				40	2.599.000	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan hasil dari Persediaan tahun 2025 yang di habis kan pada semester II Tahun 2025. Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK berupa Kertas HVS.

Tanah
Rp.9,141,918,500,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi per 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 masing-masing Rp9,141,918,500,00 dan Rp9,141,918,500,00, tidak ada perubahan dalam aset tanah. Rincian kepemilikan sertipikat :- Sertifikat Hak Pakai No. 21.10.05.05.4.00003 Tahun 19 September 2015 seluas305.836 m2, Lokasi Jl. Soekarno Hatta Desa Matahora, atas nama Pemerintah RI.Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peralatan dan Mesin
Rp3,774,472,477,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 3,774,472,477,00 dan Rp 3,774,472,477,00. tidak ada Perubahan di semester 2 tahun 2025.

Gedung dan Bangunan
Rp 21,563,309,980,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp21,563,309,980,00 dan Rp21,563,309,980,00 tidak ada Perubahan di semester 2 tahun 2025

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp 237,704,730,00,00

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp 237,704,730,00 dan Rp 237,704,730,00 Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp. 0,00 tidak ada Perubahan di semester 2 tahun 2025

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp42.600.000,00

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 42,600,000,00 berdasarkan SK MenKP Nomor :222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 5 April 2023. transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah senilai Rp. 42.600.000,00 di Tahun 2021. KDP ini tidak dilanjutkan dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada tahun 2025 dan sementara proses penghapusan aset dan sudah keluar SK PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI Nomor: 1473/KEPMEN-KP/PL.750/IX/2025 tanggal 19 September 2025.

Transaksi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai
2	Rincian KDP yang masih akan dilanjutkan			42.600.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Jalan Kampus	331/BRSDM.AKKP.WKTB/PL.420/III/2021	03-Mar-21	23.000.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Rumah Jaga	314/BRSDM.AKKP.WKTB/PL.420/II/2021	26-Feb-21	19.600.000,00
	Total			42.600.000,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(7,181,369,970)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (7,181,369,970) dan (6,425,241,979) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.774.472.477,00	3.336.603.340,00	437.869.137,00
2	Gedung dan Bangunan	21.563.309.980,00	3.783.260.188,00	17.780.049.792,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.704.730,00	61.506.442,00	176.198.288,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		25.575.487.187,00	7.181.369.970,00	18.394.117.217,00

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi belum memiliki aset tidak berwujud seperti software yang digunakan untuk keperluan operasional perkantoran.

Aset Lain-lain Rp0,00

C.11 Aset Lain Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak berubah adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, dan sampai tanggal pelaporan baru tidak ada Aset lain-lain di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (7,181,369,970)

C.12 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi penyusutan / amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah (Rp.7,181,369,970) dan (Rp.6,425,241,979) Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari

KPPN merupakan uang persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp 0,00

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak ketiga tidak ada dikarenakan tagihan listrik dan internet sudah dibayarkan di bulan berjalan atau dibulan Desember 2025

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00

C.15 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp.0,00 dan Rp.0,00

Ekuitas
Rp27,581,234,717,00

C.16 Ekuitas

Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp 27,581,234,717,00 dan Rp 28,339,835,708,00 .

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNBP

Rp 9,154,771,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp 9,154,771,00 dan Rp 11,850,227,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024*

Akun	Uraian Pendapatan	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik / Turun (Rp)
PNBP FUNGSIONAL				
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.154.771	11.850.227	(2.695.456)
425411	Pendapatan Ujian/seleksi masuk pendidikan	-	-	-
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-	-
425421	Pendapatan Layanan pendidikan dan atau pelatihan	-	-	-
JUMLAH PNBP FUNGSIONAL		9.154.771	11.850.227	(2.695.456)
JUMLAH PNBP UMUM		9.154.771	11.850.227	(2.695.456)

*** Pendapatan dari Penjualan, pengelolaan BMN**

Akun	Uraian Pendapatan	Tanggal	Nilai
PNBP FUNGSIONAL			9.154.771
425151	Pengisian 16 tabung selam.Wonderfull Wakatobi	23 April 2025	800.000
	Peminjamanmobil pick up1 hari an. Lutfipada tanggal15 April 2025	23 April 2025	140.000
	Pengisian 16 tabung selaman. Ollo Scuba pada 18 April 2025	23 April 2025	800.000
	Peminjaman alat Snorkeling 1 hari an. Lutfipada 15 April 2025	23 April 2025	10.000
	Peminjamanmobil bus 2hari an. Lutfidari 14-15April 2025	23 April 2025	700.000
	Peminjamankendaraanbus 4 roda an.Tomy AlmijunKibu selama 3hari daritanggal 20 -22 Mei 2025	26 Mei 2025	1.050.000
	Peminjaman kendaraan roda 4 berupa bus An.Sukirman pada 25 Juni 2025 untuk pengantaran jemaah haji Kabupaten Wakatobi	30 Juni 2025	350.000
	Peminjaman kendaraan roda 4 berupa bus An. Samo untuk kegiatan tamasya anak MTSN 1.Wangi-Wangi	30 Juni 2025	350.000
	Sewa Bus SDN 1 Mandati 2	07 Juli 2025	350.000
	Sewa bus selama 5 hari tgl 27 Juni s/d01 Juli 2025 an. WWF Indonesia	08 Juli 2025	1.750.000
	Peminjaman alat selam 2set an. Prof.Sri Pujiati pada hari Sabtu, 26 Juli 2025	31 Juli 2025	900.000
	Pengisian tabung selam 2 unit an.Prof. Sri Pujiati pada hari Sabtu, 26Juli 2025	31 Juli 2025	100.000
	Pengisian tabung selam oleh Sarfil Pesona Wakatobi pada tanggal 26 Agustus 2025 sebanyak 10 tabung	30 September 2025	500.000
	Pengisian tabung selam an. Guntur manager Ollo Scuba Dive pada tanggal 24 September 2025 sebanyak 10 tabung	30 September 2025	500.000
	Peminjaman kendaraan roda empat berupa bus 1 hari pada tanggal 8 Oktober 2025 an, BPJS Kesehatan Wakatobi	13 Oktober 2025	350.000
	Peminjaman roda empat berupa bus selama 1 hari oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi pada tanggal 9 Desember 2025	12 Desember 2025	350.000

Beban Pegawai

Rp2,667,783,970,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp 2,667,783,970,00 dan Rp2,167,269,912,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	664.431.800	560.362.800	18,57
Beban Pembulatan Gaji	7.368	5.392	36,65
Beban Tunj.Suami/Istri	50.415.980	39.906.850	26,33
Beban Tunj.Anak	18.543.520	13.637.700	35,97
Beban Tunj.Struktural	7.560.000	7.560.000	-
Beban Tunj.Fungsional	102.250.000	98.350.000	3,97
Beban Tunj.PPH	7.051.961	6.172.201	14,25
Beban Tunj.Beras	38.382.600	32.009.640	19,91
Beban Tunj.Uang makan	91.812.000	74.796.000	22,75
Beban Tunj. Umum	4.560.000	3.415.000	33,53
Beban Tunj.Profesi Dosen	195.429.600	50.567.700	286,47
Beban Pegawai (Tunjangan khusus)	772.493.496	802.675.424	(3,76)
Beban Gaji Pokok PPPK	258.941.800	172.650.800	49,98
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.423	3.048	45,11
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.709.230	4.674.740	150,48
Beban Tunjangan Anak PPPK	3.977.042	1.746.220	127,75
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23.625.000	20.940.000	12,82
Beban Tunjangan Beras PPPK	13.397.700	6.807.480	96,81
Beban Uang Makan PPPK	55.453.000	29.958.000	85,10
Beban Tunjangan Umum PPPK	3.840.000	-	#DIV/0!
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	343.897.450	241.030.917	42,68
Jumlah	2.667.783.970,00	2.167.269.912,00	23,09

Beban Persediaan

Rp30.842.130,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp30.842.130,00 dan Rp58.764.880,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Des-25	30-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	29.217.130,00	50.974.880,00	(42,68)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	1.625.000,00	7.790.000,00	(79,14)
Jumlah Beban Persediaan	30.842.130,00	58.764.880,00	(47,52)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.703.953.219,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.703.953.219,00 dan Rp2.194.300.652,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan perkantoran	416.936.013,00	593.005.287,00	-29,69
Beban pengadaan bahan makanan	-	-	#DIV/0!
Beban pengiriman surat dinas	-	1.091.300,00	-100,00
Beban honor operasional	70.500.000,00	56.588.000,00	24,58
Beban barang operasional lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban bahan	40.037.996,00	158.036.578,00	-74,67
Beban Honor output kegiatan	-	8.160.000,00	-100,00
Beban barang non operasional lainnya	567.530.000,00	318.060.190,00	78,43
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	99.583.688,00	136.117.897,00	-26,84
Beban Langganan Telepon	-	-	#DIV/0!
Beban langganan daya dan jasa lainnya	11.324.522,00	21.088.500,00	-46,30
Beban sewa	9.491.000,00	7.500.000,00	26,55
Beban jasa profesi	2.700.000,00	16.487.000,00	-83,62
Beban Jasa Lainnya	480.850.000,00	873.165.900,00	-44,93
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	-	-	#DIV/0!
Jumlah	1.703.953.219,00	2.194.300.652,00	-22,35

Beban Pemeliharaan
Rp176.971.289,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp176.971.289,00 dan Rp577.082.479,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.613.806,00	255.571.201,00	-71,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.655.801,00	176.720.278,00	-51,53
Beban Pemeliharaan Jaringan	19.521.682,00	144.791.000,00	-86,52
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	#DIV/0!
Jumlah	176.791.289,00	577.082.479,00	-69,36

Beban Perjalanan Dinas
Rp22.524.500,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp22.524.500,00 dan Rp401.651.384,00

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	22.524.500,00	390.236.384,00	-94,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	11.415.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0,00
Jumlah	22.524.500,00	401.651.384,00	-94,39

Beban Penyusutan
Rp756.127.991,00

D.7. Beban Penyusutan

Jumlah Beban penyusutan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp756.127.991,00 dan Rp 400,114,560,00

Beban Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian atas Beban penyusutan untuk Semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	275.999.818,00	160.050.474,00	72,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473.063.775,00	236.531.887,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	3.789.304,00	1.894.652,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.275.094,00	1.637.547,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	756.127.991,00	400.114.560,00	88,98

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp14.007.000,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas berasal dari sisa pembelian seragam untuk anak pelaku utama perikanan. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	Rp -	Rp -	-
Pendapatan dari penjualan tanah,gedung dan bangunan	Rp -	Rp -	-
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	14.007.000,00	8.868.175,00	57,95
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	14.007.000,00	8.868.175,00	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIOAN LAINNYA	-	-	#DIV/0!
Beban penyesuaian Nilai persediaan	-	-	#DIV/0!
Jumlah	14.007.000,00	8.868.175,00	58

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp, Rp.
28,339,835,708,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada LPE per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp 28,339,835,708,00 dan Rp29,127,048,479,00

*Defisit LO
(5,329,861,328)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp (5,329,861,328) dan Rp (6,174,839,926). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas
Rp 4,571,260,337*

E.3 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp 4,571,260,337,00 dan Rp 5,387,627,155,00

*Kenaikan/Penurunan
Ekuitas (758,600,991)*

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp. (758,600,991) dan Rp (787,212,771)

*Ekuitas Akhir Rp,
27,581,234,717,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 27,581,234,717,00 dan Rp. 28,339,835,708,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- ***(automatic Adjustment) Pagu blokir***

Sesuai Surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B.3045/BPPSDM.1/RC.420/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 perihal Penyampaian Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDM TA 2025. Akkp mendapat pagu blokir yaitu berupa pemblokiran kegiatan belanja barang dengan rincian Terlampir.

- ***Menghapus KDP***

transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah senilai Rp. 42.600.000,00 Tahun perolehan 2021. KDP ini tidak dilanjutkan dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Akademi Komunitas KP Wakatobi. Ditahun 2024 tersediannya anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.500.000.000. dengan skema di awal januari 2024 akan melakukan revisi untuk dibagi belanja modal gedung dan bangunan sebagian untuk melanjutkan KDP. Sebagai dasar surat pernyataan melanjutkan KDP pada Laporan Keuangan semester 2 tahun 2023 pada bulan Januari 2024. Ternyata di awal januari 2024 sesuai *Sesuai Surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 perihal Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) BPPSDM KP TA 2024.* Terdapat pemblokiran pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan dan diperkuat arahan dari inspektur 3. Menyatakan bahwa KDP lebih dari 2 tahun disarankan dihapus untuk mengurangi resiko-resiko kedepan. AKKP Wakatobi mengajukan surat pernyataan tidak melanjutkan KDP dengan Nomor Surat B.943/AKKP.WKTB/KP.120/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 dan sudah keluar SK Penghapusan Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Nomor 1473/KEPMEN-KP/PL.750/IX/2025 Tanggal 19 September 2025 (terlampir)

Transaksi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sbb :

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai
2	Rincian KDP yang masih akan dilanjutkan			42.600.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Jalan Kampus	331/BRSDM.AKKP.WKTB/ PL.420/III/2021	03-Mar-21	23.000.000,00
	- Pengadaan Perencanaan Rumah Jaga	314/BRSDM.AKKP.WKTB/ PL.420/II/2021	26-Feb-21	19.600.000,00
	Total			42.600.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-37/MK.02/2025 24 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 - b. Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah), dengan rincian per Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
2. Mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025, adalah sebagai berikut:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
 - 1) Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**;
 - 2) Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**;
 - 3) Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 1), tidak termasuk:
 - a) Belanja pegawai; dan
 - b) Belanja bantuan sosial.
 - b. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., **diprioritaskan selain dari**:
 - 1) Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

- 2) Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025.
 - 4) Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
- c. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
 - d. Menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi dalam Lampiran dan telah mendapat persetujuan mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal **14 Februari 2025**.
 - e. Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 Kementerian/Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.d., maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA.
 - f. Pengusulan sebagaimana pada butir 2.d. di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan perubahannya.

Seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden RI
3. Pimpinan DPR RI

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

4. Ketua Badan Anggaran DPR RI
5. Ketua Komisi I s.d. XIII DPR RI
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
7. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
8. Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
9. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
10. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
12. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
13. Menteri Koordinator Bidang Pangan
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
15. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan



IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21,6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.3045/BPPSDM.1/RC.420/III/2025 24 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Usulan Revisi Relaksasi
Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDM TA 2025

Yth. 1. Para Kepala Pusat lingkup BPPSDM
2. Para Kepala UPT lingkup BPPSDM
di-
Tempat

Berkenaan Surat a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan Nomor B.241/MEN-SJ/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Usulan Relaksasi Anggaran KKP Tahun 2025 Pasca Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, disampaikan bahwa KKP mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran melalui pembukaan blokir dengan total Rp2.120.355.524.000,-. Dari usulan relaksasi dimaksud, terdapat usulan pembukaan blokir anggaran BPPSDM sebesar Rp289.725.962.000,- untuk membiayai belanja operasional, belanja program prioritas, dan belanja dukungan tusi (rincian terlampir).

Berkenaan hal di atas, agar Saudara dapat segera menyampaikan usulan revisi relaksasi/buka blokir efisiensi anggaran (Kode A) kepada Kepala BPPSDM dengan kelengkapan data dukung dikirim melalui email pa.brsdmkp@gmail.com selambatnya hari Senin 24 Maret 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Muhammad Guntur di nomor HP <https://wa.me/+6282113924823>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BPPSDM
Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan :
Kepala BPPSDMKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor : B.241/MEN-SJ/RC.420/III/2025 21 Maret 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Relaksasi Anggaran KKP Tahun 2025 Pasca Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025

Yth. **Menteri Keuangan**
c.q. Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, maka KKP telah menindaklanjuti efisiensi belanja dimaksud, dengan tetap berkomitmen untuk memenuhi layanan publik dan menjalankan program prioritas sesuai arahan Presiden secara optimal.

Sejalan dengan itu, alokasi anggaran yang tersedia pasca efisiensi telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan gaji dan biaya dasar operasional perkantoran selama bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Namun berdasarkan hasil perhitungan kami, sisa anggaran efektif yang tersedia saat ini tidak cukup membiayai kebutuhan dasar operasional perkantoran sampai dengan akhir tahun dan tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program – program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam 8 misi asti cita Bapak Presiden yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga keterbatasan ketersediaan anggaran efektif di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dapat berakibat terhadap:

1. **Program peningkatan produksi ikan dan garam tidak dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan akhir tahun**, sehingga berpotensi mengakibatkan target produksi ikan sebesar 12,94 juta ton, produksi rumput laut sebesar 11,64 juta ton, dan produksi garam sebesar 2,25 juta ton tidak dapat dicapai. Hal ini akan menghambat terwujudnya swasembada pangan yang bersumber dari protein ikan dan swasembada garam yang telah dicanangkan pemerintah, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pembudidaya ikan.
2. **Program peningkatan daya saing dan mutu untuk ekspor tidak dapat dilaksanakan secara optimal sampai akhir tahun**, sehingga berpotensi target nilai ekspor komoditas hasil kelautan dan perikanan sebesar USD 6,25 Miliar tidak tercapai. Hal ini karena tidak tersedianya alokasi anggaran secara cukup untuk peningkatan produksi ikan sebagai bahan baku ekspor, melaksanakan pelayanan publik untuk jaminan mutu, dan sertifikasi untuk ekspor yang menjadi prasyarat ekspor.
3. **Program untuk peningkatan PNBPN sektor Kelautan dan Perikanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal**, sehingga berpotensi tidak tercapainya target PNBPN sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp2.881.655.374.000,- karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan dukungan untuk mendapatkan

PNBP yaitu; (i) honorarium enumerator; (ii) operasional untuk pengawasan sumber daya kelautan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan; (iii) pelaksanaan kegiatan survei dan identifikasi.

4. **Program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana**, sehingga dapat mengganggu program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang saat ini prioritas pemerintah khususnya bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar.
5. **Fungsi pelayanan pendidikan, operasional perkantoran dan pelayanan publik yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun**, sehingga dapat mengganggu pelayanan dasar dan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan adanya relaksasi efisiensi anggaran melalui pembukaan blokir sebesar Rp2.120.355.524.000,- dengan rincian sebagaimana terlampir.

Besar harapan kami, usulan tersebut dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit kerja Eselon I terkait.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan Yth.

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.241/MEN-SJ/RC.420/III/2025
 Tanggal : 21 Maret 2025

Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran KKP TA 2025

(dalam ribu rupiah)

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Sekretariat Jenderal	571,248,818	256,123,122	315,125,696
Belanja Operasional	319,865,801	214,870,351	104,995,450
Belanja Pegawai	90,268,469	90,268,469	-
Belanja Ops Perkantoran	229,597,332	124,601,882	104,995,450
Belanja Program Prioritas	19,500,000	1,632,655	17,867,345
Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang KP	5,500,000	798,143	4,701,857
Sapras Data Satelit Radar	606,731	-	606,731
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4,459,766	703,097	3,756,669
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8,933,503	131,415	8,802,088
Belanja Dukungan Tusi	231,883,017	39,620,116	192,262,901
Layanan Penyiapan Produk Hukum	12,500,000	1,296,829	11,203,171
Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi KKP	15,500,000	1,412,443	14,087,557
Layanan Pengelolaan Keuangan	11,500,000	1,052,589	10,447,411
Layanan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, Kerja Sama Antarlembaga, dan Kajian Kebijakan	29,000,000	3,137,748	25,862,252
Layanan Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang dan Jasa	78,744,646	22,309,993	56,434,653
Layanan Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	19,040,017	1,620,969	17,419,048
Layanan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi	35,000,000	3,317,976	31,682,024
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	20,598,354	5,471,569	15,126,785
Tugas Pembantuan	10,000,000	-	10,000,000
Inspektorat Jenderal	81,913,169	45,031,513	36,881,656
Belanja Operasional	43,592,339	41,565,316	2,027,023
Belanja Pegawai	39,011,970	39,011,970	-
Belanja Ops Perkantoran	4,580,369	2,553,346	2,027,023
Belanja Program Prioritas	28,760,269	3,400,930	25,359,339

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Pengawasan Intern atas Program Prioritas dan Manajerial	28,760,269	3,400,930	25,359,339
Belanja Dukungan Tusi	9,560,561	65,267	9,495,294
Dukungan Manajemen	9,560,561	65,267	9,495,294
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1,260,254,575	1,005,322,493	254,932,082
Belanja Operasional	366,744,447	292,663,783	74,080,664
Belanja Pegawai	206,783,053	206,783,053	-
Belanja Ops Perkantoran	159,961,394	85,880,730	74,080,664
Belanja Program Prioritas	26,657,405	16,000,000	10,657,405
Bantuan alat penangkapan ikan	10,100,146	6,000,000	4,100,146
Bantuan sarana penangkapan ikan	16,557,259	10,000,000	6,557,259
Belanja Dukungan Tusi	187,160,723	54,170,971	132,989,752
Pengembangan Kalamo	16,119,417	15,907,204	212,213
Penyusunan alokasi SDI dan usaha, partisipasi Indonesia di RFMO	8,600,000	3,521,000	5,079,000
Integrasi sistem perizinan dan elektronik PIT (e- PIT)	7,761,350	1,805,495	5,955,855
Operasional dan pelayanan kepelabuhanan perikanan	31,662,383	6,703,393	24,958,990
Layanan penerbitan dokumen kapal perikanan	2,500,000	502,269	1,997,731
Penguatan SDM untuk mendukung PIT	24,139,205	14,528,386	9,610,819
Penguatan Data dan Informasi PIT serta PNBp pascaproduksi	1,900,000	567,015	1,332,985
Pemberdayaan Nelayan	7,088,650	2,231,065	4,857,585
Dukungan Manajemen Pusat, UPT, dan Perintis	74,930,874	8,240,844	66,690,030
Tugas Pembantuan	12,458,844	164,300	12,294,544
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	679,692,000	642,487,739	37,204,261
Pembangunan Outering Fishing Port (Eco Fishing Port) (PHLN)	263,692,000	253,558,125	10,133,875
Pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (IFP IFM - PHLN)	406,000,000	388,929,614	17,070,386
Ocean for Prosperity Project (Lautra)	10,000,000	-	10,000,000
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	937,839,654	508,851,519	428,988,135
Belanja Operasional	315,519,520	281,096,764	34,422,756
Belanja Pegawai	199,890,284	199,890,284	-
Belanja Ops Perkantoran	115,629,236	81,206,480	34,422,756
Belanja Program Prioritas	101,537,083	35,517,878	66,019,205
Bantuan Benih	22,902,083	13,800,056	9,102,027

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Bantuan Calon Induk	2,960,000	1,888,591	1,071,409
Bantuan Bioflok	27,950,000	6,067,843	21,882,157
Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan	12,750,000	1,160,373	11,589,627
Bimbingan Teknis PB	5,500,000	1,871,778	3,628,222
Sosialisasi Kebijakan PB	5,500,000	3,940,750	1,559,250
Bantuan KJA	4,500,000	705,973	3,794,027
Bantuan Bibit Rumput Laut	2,625,000	901,006	1,723,994
Kebun Bibit Rumput Laut	9,350,000	1,682,425	7,667,575
Bantuan Sarpras UPR/HSRT	1,250,000	302,670	947,330
PITAP	6,250,000	3,196,413	3,053,587
Belanja Dukungan Tusi	97,819,051	41,166,845	56,652,206
Modeling Budidaya Kekekangan	10,000,000	1,707,640	8,292,360
Rekomendasi Kebijakan PB	4,000,000	2,726,079	1,273,921
Pembinaan Sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB	1,387,500	189,792	1,197,708
Registrasi Pakan dan Obat Ikan	300,000	209,743	90,257
Monitoring Residu	1,000,000	-	1,000,000
Monitoring Penyakit Ikan	700,000	33,641	666,359
Produksi Calon Induk	17,505,865	10,683,112	6,822,753
Sampel Laboratorium Keskanling	4,337,043	1,743,974	2,593,069
Sampel Laboratorium Pakan/Obat	192,365	103,854	88,511
Produksi Pakan Ikan untuk Operasional UPT	3,334,476	1,844,678	1,489,798
Produksi Benih	5,852,000	2,096,591	3,755,409
Produksi Ikan Konsumsi	8,504,189	3,246,538	5,257,651
Dukungan Manajemen Pusat, UPT, dan BLU	36,705,613	16,581,203	20,124,410
Tugas Pembantuan	4,000,000	-	4,000,000
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	422,964,000	151,070,032	271,893,968
Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) - Pinjaman ADB	400,000,000	131,906,574	268,093,426
Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas - Pinjaman World Bank	10,000,000	8,345,000	1,655,000
Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia - Hibah GEF	12,964,000	10,818,458	2,145,542
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	827,108,763	428,650,299	398,458,464
Belanja Operasional	280,009,193	241,968,602	38,040,591

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Belanja Pegawai	197,743,333	197,743,333	-
Belanja Ops Perkantoran	82,265,860	44,225,269	38,040,591
Belanja Program Prioritas	391,782,218	155,733,675	236,048,543
Operasi Kapal Pengawas	310,528,588	123,951,805	186,576,783
Operasi Pesawat Patroli	40,000,000	22,699,796	17,300,204
Operasi Speedboat Pengawas	9,828,000	4,180,626	5,647,374
Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	679,690	115,613	564,077
Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9,532,000	1,098,700	8,433,300
Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	1,595,000	321,333	1,273,667
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000	1,280,385	2,530,615
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000	396,542	1,114,458
Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7,654,000	1,029,610	6,624,390
Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	2,998,988	330,449	2,668,539
Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1,995,952	328,076	1,667,876
Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	150,000	-	150,000
Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	400,000	740	399,260
Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1,098,000	-	1,098,000
Belanja Dukungan Tusi	155,317,352	30,948,022	124,369,330
Sosialisasi/Bimtek Pokmaswas (Aspirasi)	5,500,000	-	5,500,000
Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	58,849,447	18,010,268	40,839,179
Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun	8,968,000	-	8,968,000
Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1,183,000	213,800	969,200
Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000	-	547,000
NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000	-	220,000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000	-	300,000
Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	900,000	-	900,000
Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	264,000	-	264,000
Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	264,000	-	264,000
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	242,000	-	242,000
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	270,000	-	270,000

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	330,500	79,490	251,010
Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	663,987	245,000	418,987
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	2,000,000	607,241	1,392,759
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	2,330,000	711,696	1,618,304
Penanganan Perkara TPKP yang dipantau	1,650,000	184,942	1,465,058
Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	2,754,000	32,280	2,721,720
NSPK bidang Penanganan Pelanggaran	194,000	-	194,000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	264,000	-	264,000
Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	300,000	150,000	150,000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	322,000	-	322,000
Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	1,559,150	-	1,559,150
NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	355,000	-	355,000
Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	453,000	1,458	451,542
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	200,000	-	200,000
Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	1,732,000	450,000	1,282,000
NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	198,000	-	198,000
Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	454,508	120,487	334,021
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Pusat dan UPT)	56,886,760	10,141,360	46,745,400
Dekonsentrasi	1,763,000	-	1,763,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Tugas Pembantuan)	3,400,000	-	3,400,000
Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk KP	255,259,620	151,287,275	103,972,345
Belanja Operasional	106,621,051	92,881,518	13,739,533
Belanja Pegawai	78,090,574	78,090,574	-
Belanja Ops Perkantoran	28,530,477	14,790,944	13,739,533
Belanja Program Prioritas	124,074,526	54,960,247	69,114,279
Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri	2,574,000	876,691	1,697,309
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia Skala Internasional	1,700,000	1,482,023	217,977
Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar	515,950	96,827	419,123
Penumbuhan Eksportir Kelautan Perikanan	700,000	134,277	565,723
Profil Pasar Dalam dan Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan	800,000	127,480	672,520
Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran	1,700,000	425,462	1,274,538

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Pembangunan Sentra Kuliner Ikan di Kalamo	38,000,000	26,819,831	11,180,169
Profil Industri dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	1,000,000	149,183	850,817
Tata Kelola dan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas	900,000	132,133	767,867
Penerapan Sistem Telusur dan Cara Distribusi Ikan Yang Baik	1,292,929	241,409	1,051,520
Kemitraan Pengadaan, Distribusi, dan Penyimpanan Hasil Perikanan	1,125,000	189,476	935,524
Gudang Beku Portable	2,300,000	1,169,832	1,130,168
Sarana dan Prasarana Gudang Beku	2,991,944	115,794	2,876,150
Sarana Pengolahan Hasil KP	4,974,500	3,759,711	1,214,789
Promosi Usaha dan Investasi	5,000,000	509,305	4,490,695
Pemberdayaan Usaha bagi UMKM	7,244,000	1,261,950	5,982,050
Fasilitasi Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	375,000	51,492	323,508
Fasilitasi UMKM dalam Inkubator Bisnis	450,000	97,943	352,057
Pembinaan Pelaku Usaha Industri dan UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	9,003,550	1,353,883	7,649,667
Pengembangan Standar dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	1,902,153	397,227	1,504,926
Sosialisasi/Kampanye Gemarikan	30,500,000	9,774,350	20,725,650
Bantuan Peralatan Pemasaran (Coolbox)	6,979,500	4,419,990	2,559,510
Bantuan Chest Freezer	2,046,000	1,373,978	672,022
Belanja Dukungan Tusi	24,564,043	3,445,510	21,118,533
Layanan Hukum	1,200,000	441,209	758,791
Layanan Bantuan Hukum	210,000	102,938	107,062
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,559,000	194,971	1,364,029
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	800,000	77,360	722,640
Layanan Umum	3,991,043	794,859	3,196,184
Layanan Data dan Informasi	2,000,000	236,017	1,763,983
Layanan Manajemen SDM	800,000	77,720	722,280
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,387,193	336,468	3,050,725
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,110,000	107,082	1,002,918
Layanan Manajemen Keuangan	1,630,000	543,082	1,086,918
Layanan Barang Milik Negera	1,390,000	135,590	1,254,410
Layanan Reformasi Kinerja	800,000	82,682	717,318
Layanan Kerja Sama	898,000	315,532	582,468

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Tugas Pembantuan	4,788,807	-	4,788,807
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	623,593,286	430,721,742	192,871,544
Belanja Operasional	174,126,973	169,572,748	4,554,225
Belanja Pegawai	134,729,720	134,729,720	-
Belanja Ops Perkantoran	39,397,253	34,843,028	4,554,225
Belanja Program Prioritas	128,386,547	34,174,220	94,212,327
Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi	8,176,521	1,547,080	6,629,441
Pengelolaan Biota Perairan	15,512,767	3,662,493	11,850,274
Penyelesaian penataan ruang laut (termasuk Integrasi RZ dan RTR)	21,940,000	4,737,426	17,202,574
Penyelenggaraan KKPR, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	18,800,000	5,436,959	13,363,041
Penyadartahuan masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil resiko bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim	985,830	204,731	781,099
Penguatan Tata Kelola Reklamasi dan Sedimentasi Laut	5,000,000	1,112,851	3,887,149
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	12,581,938	2,986,108	9,595,830
Sarana Niaga Garam Rakyat	4,000,000	2,295,441	1,704,559
Tata Kelola Pergaraman	2,500,000	-	2,500,000
Pengelolaan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	5,200,000	1,494,314	3,705,686
Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7,000,000	5,500,000	1,500,000
Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2,500,000	100,000	2,400,000
Fasilitasi Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2,300,000	477,359	1,822,641
Pengelolaan Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	5,585,000	1,138,293	4,446,707
Rehabilitasi kawasan mangrove	956,450	286,047	670,403
Pengelolaan perizinan pemanfaatan jasa bahari dan sumberdaya kelautan	14,504,491	2,756,594	11,747,897
Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)	141,680	94,205	47,475
Pengembangan kawasan pesisir bersih	701,870	344,319	357,551
Belanja Dukungan Tusi	37,335,766	13,075,791	24,259,975
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tusi teknis lainnya 47 satker lingkup DJPRL (5 satker pusat, 8 UPT)	30,195,766	13,075,791	17,119,975
TP Provinsi	7,140,000	-	7,140,000
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	283,744,000	213,898,983	69,845,017
Oceans for Prosperity Project - Lautra	283,744,000	213,898,983	69,845,017
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP	1,327,635,158	1,037,909,196	289,725,962
Belanja Operasional	1,012,695,604	913,214,068	99,481,536

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Belanja Pegawai	795,427,494	795,427,494	-
Belanja Ops Perkantoran	217,268,110	117,786,574	99,481,536
Belanja Program Prioritas	266,310,110	116,685,683	149,624,427
Kelompok Masyarakat yang disuluh	27,000,000	7,703,717	19,296,283
Smart Fisheries Village/ Desa Perikanan Cerdas	1,650,000	83,809	1,566,191
Percontohan Penyuluhan	1,791,405	-	1,791,405
Sertifikasi penyuluh	50,000	-	50,000
Peserta Didik	151,101,832	70,010,639	81,091,193
Penelitian Pendidikan Tinggi	3,160,000	63,310	3,096,690
Pengabdian masyarakat	1,348,000	63,400	1,284,600
Sertifikasi dosen dan tenaga pendidik	1,500,000	54,611	1,445,389
Pelatihan Masyarakat KP	38,046,601	9,779,867	28,266,734
Sertifikasi masyarakat	631,650	514,050	117,600
Sarpras Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan	36,600,940	27,189,976	9,410,964
NSPK dan dukungan teknis Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan	3,429,682	1,222,304	2,207,378
Belanja Dukungan Tusi	48,629,444	8,009,445	40,619,999
Dukungan manajemen untuk layanan perencanaan, layanan kehumasan dan lain-lain	23,739,025	3,906,975	19,832,050
Sarpras internal perkantoran dan diklat	12,751,059	-	12,751,059
Beasiswa Aparatur	8,458,981	3,462,828	4,996,153
Izin Belajar Aparatur	41,019	1,458	39,561
Diklat Aparatur	3,639,360	638,184	3,001,176
Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Mutu Kelautan dan Perikanan	342,649,736	243,250,096	99,399,640
Belanja Operasional	286,930,430	233,449,004	53,481,426
Belanja Pegawai	177,242,617	177,242,617	-
Belanja Ops Perkantoran	109,687,813	56,206,387	53,481,426
Belanja Program Prioritas	26,700,351	4,037,866	22,662,485
Sertifikasi mutu unit usaha KP sektor produksi primer	6,800,000	950,903	5,849,097
Sertifikasi mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	7,000,000	1,012,613	5,987,387
Survailence Unit Usaha Perikanan dalam rangka konsistensi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1,000,000	179,965	820,035
Penambahan ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji	5,600,351	1,118,877	4,481,474
Assesment quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	500,000	38,000	462,000

Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Efektif	Usulan Pembukaan blokir
Penerapan standar sistim pengujian dan manajemen mutu laboratorium dalam rangka akreditasi	4,800,000	737,508	4,062,492
Sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP	1,000,000	-	1,000,000
Belanja Dukungan Tusi	29,018,955	5,763,226	23,255,729
Dukungan manajemen (Pusat, UPT)	22,143,955	5,763,226	16,380,729
Sosialisasi pangan bermutu dan aman konsumsi (BP)	6,875,000	-	6,875,000
Jumlah	6,227,502,779	4,107,147,255	2,120,355,524

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
ALOKASI Rp. 4,683,167,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			710,310,000	
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan			710,310,000	
2376.PDE	Akreditasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja		26,505,000	

	Lokasi : KAB. WAKATOBI				
2376.PDE.541	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.0 Unit Kerja		26,505,000	
301	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan			26,505,000	U
GB	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan			26,505,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.103-Bau-Bau)			26,505,000	RM
	- Peningkatan Kapasitas Mutu Internal AKKPWakotobi	1.0 PAKET	26,505,000	26,505,000	
2376.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM[Base Line]	3.0 Orang, Sertifikat		22,570,000	

	Lokasi : KAB. WAKATOBI				
2376.PDI.545	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3.0 Orang		22,570,000	
301	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi			22,570,000	U
ZB	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi (Seminar dan Workshop) (Efisiensi)			22,570,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.103-Bau-Bau)			22,570,000	RM
	> Perjalanan Diklat/Magang/Kursus			22,570,000	
	- Tiket PP	5.0 OK	2,344,000	11,720,000	
	- Transport	5.0 OK	115,000	575,000	
	- Uang Harian	23.0 OH	340,000	7,820,000	
	- Penginapan	5.0 OH	491,000	2,455,000	
2376.SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	32.0 Orang		661,235,000	

	Lokasi : KAB. WAKATOBI				
2376.SAC.811	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	32.0 Orang		661,235,000	
302	Pengajaran dan Perkuliahan			77,395,000	U
GA	Pengajaran dan Perkuliahan			6,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.103-Bau-Bau)			3,500,000	RM
	- Cetak Blangko Ijasah	50.0 LMBAR	60,000	3,000,000	
	- Blanko Transkrip	1.0 RIM	500,000	500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.103-Bau-Bau)			2,700,000	RM
	- Honor Narasumber	3.0 OJ	900,000	2,700,000	
GB	Wisuda			16,885,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.103-Bau-Bau)			5,125,000	RM
	- Gordon	41.0 BUAH	125,000	5,125,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
ALOKASI Rp. 4,683,167,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			5,410,000	RM
	- Sewa Tenda/Kursi/Meja/Sound Sytem/Sewa Gedung	1.0 PAKET	5,410,000	5,410,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			6,350,000	RM
	- Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi/Acara/Lainnya	1.0 PAKET	6,350,000	6,350,000	
GC	<i>Penyelenggaraan Praktek TEFA / Regular / Praktek Laut</i>			41,600,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			24,000,000	RM
	- Praktek Mata Kuliah	2.0 PAKET	8,500,000	17,000,000	
	- Bahan Dukungan Kewirausahaan	1.0 PAKET	7,000,000	7,000,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			17,600,000	RM
	- Bahan Dukungan Teaching Factory	2.0 PAKET	8,800,000	17,600,000	
ZB	<i>Penyelenggaraan Praktek TEFA/Regular/Praktek Laut (Efisiensi)</i>			12,710,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			12,710,000	A PNP
	- Bahan Dukungan Teaching Factory	1.0 PAKET	12,710,000	12,710,000	*
303	Sertifikasi Peserta Didik			138,425,000	U
GA	<i>Sertifikasi Kompetensi</i>			138,425,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			138,425,000	RM
	- Sertifikasi Selam A1 Angkatan VIII	41.0 BUAH	1,225,000	50,225,000	
	- Sertifikasi Selam A2 Angkatan VIII	41.0 BUAH	1,225,000	50,225,000	
	- Sertifikasi Selam A1 Angkatan IX	31.0 BUAH	1,225,000	37,975,000	
304	Pendidikan Karakter			7,439,000	U
GA	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Asrama dan Ketarunaan</i>			7,439,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			7,439,000	RM
	- Bahan Kegiatan Ekstra Kurikuler Dan Ko Kurikuler	1.0 PAKET	7,439,000	7,439,000	
305	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik			437,976,000	U
GA	<i>Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik</i>			437,976,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			437,976,000	RM
	- Bantuan Makan Taruna (52 ORANG X 245 HARI)	10526.0 OH	36,000	378,936,000	
	- Bantuan Uang Makan PKL Konservasi (16 ORANG X 40 HARI)	640.0 OH	36,000	23,040,000	
	- Bantuan Uang Makan PKL Ekowisata Bahari (27 ORANG X 40 HARI)	1000.0 OH	36,000	36,000,000	
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen			3,972,857,000	
2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber			3,972,857,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 UNIT KERJA (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
 ALOKASI Rp. 4,683,167,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2378.EBA	Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,972,857,000	
2378.EBA.994	Lokasi : KAB. WAKATOBI Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,972,857,000	
001	Gaji dan Tunjangan			2,698,933,000	U
GA	Pembayaran Gaji Tunjangan			1,553,796,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			664,435,000	RM
	- Belanja Gaji	1.0 TAHUN	571,850,000	571,850,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13 dan Gaji ke-14)	1.0 BULAN	92,585,000	92,585,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			15,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 TAHUN	12,000	12,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 Bulan	3,000	3,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			50,419,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 TAHUN	43,450,000	43,450,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	6,969,000	6,969,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			18,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 TAHUN	16,000,000	16,000,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	2,560,000	2,560,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			7,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 TAHUN	6,480,000	6,480,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	1,080,000	1,080,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			102,250,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 TAHUN	87,550,000	87,550,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	14,700,000	14,700,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			7,055,000	RM
	- Tunjangan PPh PNS	1.0 TAHUN	975,000	975,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	6,080,000	6,080,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.103-Bau-Bau)			38,385,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras	1.0 TAHUN	38,385,000	38,385,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)
ALOKASI Rp. 4,683,167,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			93,609,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 TAHUN	93,609,000	93,609,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			4,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 TAHUN	3,800,000	3,800,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke-13 dan ke-14)	1.0 BULAN	760,000	760,000	
511153	<u>Belanja Tunjangan Profesi Dosen</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			195,450,000	RM
	- Tunjangan Profesi Dosen	1.0 TAHUN	195,450,000	195,450,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			258,947,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 TAHUN	233,465,000	233,465,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke-13)	1.0 BULAN	12,741,000	12,741,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke-14)	1.0 BULAN	12,741,000	12,741,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			12,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 TAHUN	10,000	10,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji Ke 13)	1.0 BULAN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji Ke 14)	1.0 BULAN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			11,716,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri P3K	1.0 TAHUN	11,046,000	11,046,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri P3K (Gaji Ke 13)	1.0 BULAN	335,000	335,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri P3K (Gaji Ke 14)	1.0 BULAN	335,000	335,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			3,985,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak P3K	1.0 TAHUN	3,715,000	3,715,000	
	- Belanja Tunjangan Anak P3K (Gaji Ke 13)	1.0 BULAN	135,000	135,000	
	- Belanja Tunjangan Anak P3K (Gaji Ke 14)	1.0 BULAN	135,000	135,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			23,625,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 TAHUN	20,565,000	20,565,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji Ke 13)	1.0 BULAN	1,530,000	1,530,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji Ke 14)	1.0 BULAN	1,530,000	1,530,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			13,405,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PPPK	1.0 TAHUN	12,385,000	12,385,000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK (Gaji Ke 13)	1.0 BULAN	510,000	510,000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK (Gaji Ke 14)	1.0 BULAN	510,000	510,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(12)
(352595)
Rp. 4,683,167,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Uang Makan PPPK	1.0 TAHUN	55,968,000	55,968,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Belanja Tunj. Umum	1.0 TAHUN	3,840,000	3,840,000	RM
GB	<u>Tunjangan Kinerja</u>			1,145,137,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Tunjangan Kinerja	1.0 TAHUN	795,153,000	795,153,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 TAHUN	349,984,000	349,984,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,273,924,000	U
GA	<u>Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran</u>			907,770,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran - Data Informasi/Publikasi - Baju Olahraga/Seragam - Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi - Map Ijazah - Estetika - Honorarium Dosen Tetap Non PNS (1 ORANG X 9 BULAN) - Honorarium Pramubakti PPNPN (8 ORANG X 9 BULAN) - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Dosen Tetap Non PNS - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pramubakti PPNPN	12.0 BULAN 1.0 TAHUN 28.0 BUAH 12.0 BULAN 41.0 BUAH 1.0 TAHUN 9.0 OB 72.0 OB 1.0 OB 8.0 OB	3,760,000 2,760,000 260,000 4,025,000 100,000 20,000,000 5,791,000 2,900,000 5,791,000 2,900,000	45,120,000 2,760,000 7,280,000 48,300,000 4,100,000 20,000,000 52,119,000 208,800,000 5,791,000 23,200,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - ATK - Bahan Komputer	7.0 PAKET 7.0 PAKET	600,000 600,000	4,200,000 4,200,000	RM
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Obat-Obatan / Alat Kesehatan	1.0 TAHUN	2,400,000	2,400,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.103-Bau-Bau) - Sewa Tenda/Kursi/Meja/Sound Sytem/Sewa Gedung/Dokumentasi/Publikasi	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)
ALOKASI Rp. 4,683,167,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			474,500,000	RM
	- Honorarium Petugas Keamanan PJLP (2 ORANG X 13 BULAN)	26.0 OB	3,500,000	91,000,000	
	- Honorarium Pramubakti PJLP (5 ORANG X 13 BULAN)	65.0 OB	3,250,000	211,250,000	
	- Honor Petugas TEFA PJLP (2 ORANG X 13 BULAN)	14.0 OB	3,250,000	45,500,000	
	- Honor Petugas Kebersihan PJLP (2 ORANG X 13 BULAN)	26.0 OB	3,250,000	84,500,000	
	- Honor Pengelola Asrama PJLP (1 ORANG X 13 BULAN)	13.0 OB	3,250,000	42,250,000	
GB	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			111,120,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			99,720,000	RM
	- Listrik	12.0 BULAN	8,310,000	99,720,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			11,400,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BULAN	950,000	11,400,000	
GC	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			177,274,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			71,630,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Administrasi A	299.0 M2	190,000	56,810,000	
	- Pemeliharaan Gedung Administrasi B dan Rektorat	78.0 M2	190,000	14,820,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			86,051,000	RM
	- Pemeliharaan AC	5.0 UNIT	610,000	3,050,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	3.0 UNIT	16,750,000	50,250,000	
	- Pemeliharaan Kompresor Selam	1.0 UNIT	7,241,000	7,241,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	2.0 UNIT	1,000,000	2,000,000	
	- Pemeliharaan Speed boat	1.0 UNIT	1,000,000	1,000,000	
	- Pemeliharaan Printer	9.0 UNIT	690,000	6,210,000	
	- Pemeliharaan Komputer/Laptop	20.0 UNIT	700,000	14,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Fotokopi	1.0 UNIT	300,000	300,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.0 TAHUN	2,000,000	2,000,000	
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u> (KPPN.103-Bau-Bau)			19,593,000	RM
	- Jaringan Air Bersih	1.0 TAHUN	9,593,000	9,593,000	
	- Jaringan Listrik	1.0 TAHUN	10,000,000	10,000,000	
GD	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			77,760,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(12)
(352595)

Rp. 4,683,167,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Halaman : 7

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.103-Bau-Bau)			77,760,000	RM
	- Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,550,000	18,600,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,510,000	18,120,000	
	- Penandatanganan SPM	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	520,000	6,240,000	
	- Staf Pengelola Keuangan (2 ORANG X 12 BULAN)	24.0 OB	390,000	9,360,000	
	- Bendahara Penerimaan	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	12.0 OB	390,000	4,680,000	
	> Pengelola Sistem Akuntansi Instansi			11,160,000	
	- Penanggung Jawab	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Anggota (3 ORANG X 12 BULAN)	36.0 OB	210,000	7,560,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Wakatobi, 11 Desember 2025

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si
NIP. 197803062009011004



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1473/KEPMEN-KP/PL.750/IX/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA
OLEH BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari atas nama Menteri Keuangan Nomor S-79/MK/KNL.1505/2025 Tanggal 16 Juli 2025 Hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi Nomor B.939/AKKP.WKTB/KU.110/V/2025 tanggal 22 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berupa 2 (dua) unit Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan seluruhnya Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dihapus dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi.
- KETIGA : Hasil penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penghapusan Barang Milik Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SUTRISNO SUBAGYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1473/KEPMEN-KP/PL.750/IX/2025
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA
 OLEH BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA AKADEMI
 KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

Unit Eselon - I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Nama Satker : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
 Kode Satker : 032.12.2000.352595.000.KD

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/ Tipe/ Spesifikasi	Perolehan		Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
					Tahun	Asal			
1	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	Perencanaan	2021	APBN	1 Unit	19.600.000	KDP yang tidak bisa dilanjutkan pengerjaannya
2	7010101004	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Jalan	2021	APBN	1 Unit	23.000.000	KDP yang tidak bisa dilanjutkan pengerjaannya
J U M L A H							40 Unit	42.600.000	

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

SUTRISNO SUBAGYO

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:55 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,154,771	11,850,227	(2,695,456)	(22.746)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,154,771	11,850,227	(2,695,456)	(22.746)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,154,771	11,850,227	(2,695,456)	(22.746)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,667,783,970	2,166,969,912	500,814,058	23.111
Beban Persediaan	30,842,130	58,764,880	(27,922,750)	(47.516)
Beban Barang dan Jasa	1,698,953,219	2,189,300,652	(490,347,433)	(22.397)
Beban Pemeliharaan	176,791,289	577,082,479	(400,291,190)	(69.365)
Beban Perjalanan Dinas	22,524,500	401,651,384	(379,126,884)	(94.392)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:55 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	756,127,991	801,789,021	(45,661,030)	(5.695)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,353,023,099	6,195,558,328	(842,535,229)	(13.599)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,343,868,328)	(6,183,708,101)	839,839,773	(13.581)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,007,000	8,868,175	5,138,825	57.947
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,007,000	8,868,175	5,138,825	57.947
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	14,007,000	8,868,175	5,138,825	57.947
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,329,861,328)	(6,174,839,926)	844,978,598	(13.684)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,329,861,328)	(6,174,839,926)	844,978,598	(13.684)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si

NIP. 197803062009011004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 12:46 AM
 Tgl Cetak : 14/01/26 6:55 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc


URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	28,339,835,708	29,127,048,479	(787,212,771)	(2.7)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,329,861,328)	(6,174,839,926)	844,978,598	(13.68)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,571,260,337	5,387,627,155	(816,366,818)	(15.15)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(758,600,991)	(787,212,771)	28,611,780	(3.63)
EKUITAS AKHIR	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si
 NIP. 197803062009011004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI) 352595

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM
 Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025					2024				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Insentif Fisikal	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4.683.167.000	4.594.422.108	(88.744.892)	98.11	6.977.329.000	5.408.345.557	(1.568.983.443)	77.51		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ARHAM TRUMPA, S.Si.Pi., M.Si.
 NIP. 197803062009011004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,599,000	5,072,000	(2,473,000)	(48.76)
JUMLAH ASET LANCAR	2,599,000	5,072,000	(2,473,000)	(48.76)
ASET TETAP				
Tanah	9,141,918,500	9,141,918,500	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,774,472,477	3,774,472,477	0	0.00
Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	21,563,309,980	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	237,704,730	237,704,730	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42,600,000	42,600,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,181,369,970)	(6,425,241,979)	(756,127,991)	11.77
JUMLAH ASET TETAP	27,578,635,717	28,334,763,708	(756,127,991)	(2.67)
JUMLAH ASET	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)
JUMLAH EKUITAS	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)
JUMLAH EKUITAS	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27,581,234,717	28,339,835,708	(758,600,991)	(2.68)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si
NIP. 197803062009011004

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,599,000	0
0.0	131111	Tanah	9,141,918,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,774,472,477	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	0
0.0	134112	Irigasi	130,731,000	0
0.0	134113	Jaringan	106,973,730	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	42,600,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,336,603,340
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,783,260,188
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	30,314,432
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	31,192,010
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,594,422,108
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	23,161,771	0
0.0	391111	Ekuitas	0	28,339,835,708
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	10,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,144,771
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,007,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	664,431,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,368	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50,415,980	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	18,543,520	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	102,250,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,051,961	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,382,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	91,812,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,560,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	195,429,600	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	258,941,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,423	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,709,230	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,977,042	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23,625,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,397,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	55,453,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,840,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	772,493,496	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 2:24 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	343,897,450	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	416,936,013	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	40,037,996	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	567,530,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	99,583,688	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,324,522	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,491,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	480,850,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,613,806	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,655,801	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	19,521,682	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22,524,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	275,999,818	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473,063,775	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	3,789,304	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,275,094	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	29,217,130	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,625,000	0
JUMLAH			40,138,789,557	40,138,789,557

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKRA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ABHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si

NIP. 197803062009011004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 12:46 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,594,422,108
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	23,161,771	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	10,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,144,771
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,007,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	664,431,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,368	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50,415,980	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	18,543,520	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	102,250,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,051,961	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,382,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	91,812,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,560,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	195,429,600	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	258,941,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,423	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,709,230	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,977,042	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23,625,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,397,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	55,453,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,840,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	772,493,496	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	343,897,450	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	416,936,013	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,400,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	40,037,996	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	567,530,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,382,130	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	19,987,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	99,583,688	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,324,522	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,491,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	480,850,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (352595) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl Data : 14/01/26 12:46 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 6:56 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,613,806	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,655,801	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19,521,682	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,524,500	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	3,900,000
JUMLAH			4,621,483,879	4,621,483,879

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Wakatobi, 14 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. ARHAM RUMPA, S.St.Pi., M.Si*
 197803062009011004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 352595

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_ib_akun_sakter_doc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			BELANJA NETTO	REALISASI ANGGARAN %	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7	
01	RUPIAH MURNI								
51	BELANJA PEGAWAI								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	623.850.000	664.435.000	664.431.800	0	664.431.800	100	3.200	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	15.000	7.368	0	7.368	49,12	7.632	
511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	43.816.000	50.419.000	50.415.980	0	50.415.980	99,99	3.020	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14.062.000	18.560.000	18.543.520	0	18.543.520	99,91	16.480	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	7.560.000	0	7.560.000	100	0	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101.500.000	102.250.000	102.250.000	0	102.250.000	100	0	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2.458.000	7.055.000	7.051.961	0	7.051.961	99,96	3.039	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38.325.000	38.382.600	38.382.600	0	38.382.600	99,99	2.400	
511129	Belanja Uang Makan PNS	134.469.000	93.609.000	91.812.000	0	91.812.000	98,08	1.797.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6.465.000	4.560.000	4.560.000	0	4.560.000	100	0	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	54.054.000	195.450.000	195.429.600	0	195.429.600	99,99	20.400	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	139.706.000	258.947.000	258.941.800	0	258.941.800	100	5.200	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	12.000	4.423	0	4.423	36,86	7.577	
511621	Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	8.659.000	11.716.000	11.709.230	0	11.709.230	99,94	6.770	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.465.000	3.985.000	3.977.042	0	3.977.042	99,8	7.958	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.750.000	23.625.000	23.625.000	0	23.625.000	100	0	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.044.000	13.405.000	13.397.700	0	13.397.700	99,95	7.300	
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33.300.000	55.968.000	55.453.000	0	55.453.000	99,08	515.000	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	3.840.000	3.840.000	0	3.840.000	100	0	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	803.155.000	795.153.000	772.493.496	0	772.493.496	97,15	22.659.504	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	206.550.000	349.984.000	343.897.450	0	343.897.450	98,26	6.086.550	
52	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	2.240.209.000	2.698.933.000	2.667.783.970	0	2.667.783.970	98,85	31.449.030	
	BELANJA BARANG								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	530.030.000	417.470.000	416.936.013	0	416.936.013	99,87	533.987	
521114	Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77.760.000	77.760.000	74.400.000	3.900.000	70.500.000	90,66	7.260.000	
521211	Belanja Bahan	130.640.000	40.064.000	40.037.996	0	40.037.996	99,94	26.004	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.264.000	0	0	0	0	0	0	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	853.080.000	602.906.000	567.530.000	0	567.530.000	94,13	35.376.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56.000.000	8.400.000	8.382.130	0	8.382.130	99,79	17.870	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	54.490.000	20.000.000	19.987.000	0	19.987.000	99,94	13.000	
522111	Belanja Langganan Listrik	168.000.000	99.720.000	99.583.688	0	99.583.688	99,86	136.312	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24.000.000	11.400.000	11.324.522	0	11.324.522	99,34	76.478	
522141	Belanja Sewa	5.000.000	10.410.000	9.491.000	0	9.491.000	91,17	919.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	40.785.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	100	0	
522191	Belanja Jasa Lainnya	513.500.000	480.850.000	480.850.000	0	480.850.000	100	0	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	513.696.000	71.630.000	71.613.806	0	71.613.806	99,98	16.194	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.850.000	86.051.000	85.655.801	0	85.655.801	99,54	395.199	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 032
 SATUAN KERJA : 352595

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	8=5/4	9=4-7		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7		
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	45,000,000	19,593,000	19,521,682	0	19,521,682	99.64	71,318		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	579,245,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.8	45,500		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,950,000	0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH BELANJA BARANG	3,780,790,000	1,971,524,000	1,930,538,138	3,900,000	1,926,638,138	97.92	44,885,862		
	JUMLAH RUPIAH MURNI	6,020,999,000	4,670,457,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98.46	76,034,892		
04	PMBP									
52	BELANJA BARANG									
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH BELANJA BARANG	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH PMBP	6,033,709,000	4,683,167,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98.19	88,744,892		
	TOTAL									

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 352595

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO 7=5+6	8=5/4		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7	
01	RUPIAH MURNI								
WA	Program Dukungan Manajemen								
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4,465,209,000	3,972,857,000	3,937,096,612	3,900,000	3,933,196,612	99.1	39,660,388	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	4,465,209,000	3,972,857,000	3,937,096,612	3,900,000	3,933,196,612	99.1	39,660,388	
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1,555,790,000	697,600,000	661,225,496	0	661,225,496	94.79	36,374,504	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	1,555,790,000	697,600,000	661,225,496	0	661,225,496	94.79	36,374,504	
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	6,020,999,000	4,670,457,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98.46	76,034,892	
04	PNBP								
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000	
	JUMLAH BELANJA PNPB	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000	
	JUMLAH	6,033,709,000	4,683,167,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98.19	88,744,892	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENERUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
		3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1	2							
01	RUPIAH MURNI							
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan							
ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	40,000,000	0	0	0	0	0	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.ABW	40,000,000	0	0	0	0	0	0
PDE	Akreditasi Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	0	26,505,000	26,505,000	0	26,505,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	26,505,000	26,505,000	0	26,505,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	26,505,000	26,505,000	0	26,505,000	0	0
5221	Belanja Jasa	26,505,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	26,505,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	26,505,000	0	0	0	0	0	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75,995,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75,995,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	75,995,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	102,500,000	26,505,000	26,505,000	0	26,505,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.PDE	102,500,000	26,505,000	26,505,000	0	26,505,000	100	0
PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	19,000,000	0	0	0	0	0	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	19,000,000	0	0	0	0	0	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	61,000,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.8	45,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61,000,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.8	45,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	61,000,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.8	45,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	80,000,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.798	45,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.PDI	80,000,000	22,570,000	22,524,500	0	22,524,500	99.798	45,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DAN/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)**

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
51111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	623,850,000	664,435,000	664,431,800	0	664,431,800	100	3,200
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,000	15,000	7,368	0	7,368	49.12	7,632
511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	43,816,000	50,419,000	50,415,980	0	50,415,980	99.99	3,020
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	14,062,000	18,560,000	18,543,520	0	18,543,520	99.91	16,480
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	101,500,000	102,250,000	102,250,000	0	102,250,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,458,000	7,055,000	7,051,961	0	7,051,961	99.96	3,039
511125	Belanja Tunj. Pph PNS	38,325,000	38,385,000	38,382,600	0	38,382,600	99.99	2,400
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	134,469,000	93,609,000	91,812,000	0	91,812,000	98.08	1,797,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	6,465,000	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,054,000	195,450,000	195,429,600	0	195,429,600	99.99	20,400
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,026,573,000	1,182,298,000	1,180,444,829	0	1,180,444,829	99.84	1,853,171
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	139,706,000	258,947,000	258,941,800	0	258,941,800	100	5,200
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7,000	12,000	4,423	0	4,423	36.86	7,577
511619	Belanja Pembuatan Gaji PPPK	8,659,000	11,716,000	11,709,230	0	11,709,230	99.94	6,770
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,465,000	3,985,000	3,977,042	0	3,977,042	99.8	7,958
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	15,750,000	23,625,000	23,625,000	0	23,625,000	100	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,044,000	13,405,000	13,397,700	0	13,397,700	99.95	7,300
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33,300,000	55,968,000	55,453,000	0	55,453,000	99.08	515,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203,931,000	371,498,000	370,948,195	0	370,948,195	99.85	549,805
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	803,155,000	795,153,000	772,493,496	0	772,493,496	97.15	22,659,504
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	206,550,000	349,984,000	343,897,450	0	343,897,450	98.26	6,086,550
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,009,705,000	1,145,137,000	1,116,390,946	0	1,116,390,946	97.49	28,746,054
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,240,209,000	2,698,933,000	2,667,783,970	0	2,667,783,970	98.85	31,149,030
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	530,030,000	417,470,000	416,936,013	0	416,936,013	99.87	533,987
52111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,500,000	0	0	0	0	0	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	77,760,000	77,760,000	74,400,000	0	74,400,000	90.66	7,260,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
 Halaman : 4
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI	
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	609,290,000	495,230,000	491,336,013	3,900,000	487,436,013	99.21	7,793,987	
5212	Belanja Barang Non Operasional	3,264,000	0	0	0	0	0	0	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,264,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,264,000	0	0	0	0	0	0	
5218	Belanja Barang Persediaan	43,400,000	8,400,000	8,382,130	0	8,382,130	99.79	17,870	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,400,000	2,395,000	0	2,395,000	99.79	5,000	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	43,400,000	10,800,000	10,777,130	0	10,777,130	99.79	22,870	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,400,000	10,800,000	10,777,130	0	10,777,130	99.79	22,870	
5221	Belanja Jasa	168,000,000	99,720,000	99,583,688	0	99,583,688	99.86	136,312	
522111	Belanja Langganan Listrik	24,000,000	11,400,000	11,324,522	0	11,324,522	99.34	75,478	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0	
522141	Belanja Sewa	513,500,000	474,500,000	474,500,000	0	474,500,000	100	0	
522191	Belanja Jasa Lainnya	705,500,000	590,620,000	590,408,210	0	590,408,210	99.96	211,790	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	168,000,000	99,720,000	99,583,688	0	99,583,688	99.86	136,312	
5231	Belanja Pemeliharaan	513,696,000	71,630,000	71,613,806	0	71,613,806	99.98	16,194	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,850,000	86,051,000	85,655,801	0	85,655,801	99.54	395,199	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45,000,000	19,593,000	19,521,682	0	19,521,682	99.64	71,318	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	738,546,000	177,274,000	176,791,289	0	176,791,289	99.73	482,711	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	513,696,000	71,630,000	71,613,806	0	71,613,806	99.98	16,194	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,162,500,000	1,273,924,000	1,269,312,642	3,900,000	1,265,412,642	99.64	8,511,358	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2378,EBA	4,402,709,000	3,972,857,000	3,937,096,612	3,900,000	3,933,196,612	99.1	39,660,388	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
52	BELANJA BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2378,EBD	62,500,000	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2378	4,465,209,000	3,972,857,000	3,937,096,612	3,900,000	3,933,196,612	99.1	39,660,388	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 032122000KD
SATUAN KERJA : 352595
JENIS SATUAN KERJA : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
 Halaman : 5
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	7=5-6	8=5/4		
1	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	6,020,999,000	4,670,457,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98,46	76,034,892		
04	PNBP									
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan									
SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Perikanan dan Perikanan									
52	BELANJA BARANG									
5218	Belanja Barang Persediaan	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2376.SAC	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2376	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	12,710,000	12,710,000	0	0	0	0	12,710,000		
	JUMLAH BELANJA	6,033,709,000	4,683,167,000	4,598,322,108	3,900,000	4,594,422,108	98,19	88,744,892		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2000
SATUAN KERJA : 352595

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
SULAWESI TENGGARA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)**

Kode Lap : LRA.P.E.1.1
Tanggal : 14/01/26 6:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
			4	5	6=4-5	7=6/3
1	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3				
42						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	6,087,000	10,000	0	10,000	0.16
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	6,840,000	9,144,771	0	9,144,771	133.7
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	12,927,000	9,154,771	0	9,154,771	70.82
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4,250,000	0	0	0	0
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	4,250,000	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-lain	0	14,007,000	0	14,007,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		14,007,000	0	14,007,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	14,007,000	0	14,007,000	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	17,177,000	23,161,771	0	23,161,771	134.84
	JUMLAH PENDAPATAN	17,177,000	23,161,771	0	23,161,771	134.84

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
 UNIT ORGANISASI : 12
 WILAYAH/PROVINSI : 2000
 SATUAN KERJA : 352595

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 SULAWESI TENGGARA
 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)

Tgl. Cetak 14/01/2026 6:58 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,072,000	0
0.0	131111	Tanah	9,141,918,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,774,472,477	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,563,309,980	0
0.0	134112	Irigasi	130,731,000	0
0.0	134113	Jaringan	106,973,730	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	42,600,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,060,603,522
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,310,196,413
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	26,525,128
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	27,916,916
0.0	391111	Ekuitas	0	28,339,835,708
JUMLAH			34,765,077,687	34,765,077,687



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250826199536
Tanggal Billing : 26-08-2025 15:25:41
Tanggal Kedaluwarsa : 02-09-2025 15:25:41
Tanggal Bayar : **27-08-2025 07:15:14**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 1.800.000 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Delapan Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **095372719300**
NTPN : **BD3583CIFTQN5KFG**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912-Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.800.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian atas PNPB hasil sampling kegiatan kewirausahaan tahun 2024 atas nama Dewi Utami



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250826232534
Tanggal Billing : 26-08-2025 19:09:12
Tanggal Kedaluwarsa : 02-09-2025 19:09:12
Tanggal Bayar : **27-08-2025 00:30:51**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 6.144.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **791585361633**
NTPN : **A88EA0NA0E3HVKMM**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912-Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 6.144.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian Honor Pengelola Keuangan Tahun 2024 atas nama PPK



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250605734295
Tanggal Billing : 05-06-2025 16:58:22
Tanggal Kedaluwarsa : 12-06-2025 16:58:22
Tanggal Bayar : **05-06-2025 19:45:38**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Satuan Kerja : **352595 - AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)**
Total Disetor : 6.063.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Juta Enam Puluh Tiga Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **560625014410**
NTPN : **E317D2G5031OGICN**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912-Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 6.063.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan bantuan anak pelaku utama tahun anggaran 2024